

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BOS DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBELAJARAN DI SMPN 6 TANJUNGPINANG

Alfamela Putri¹, Irma Ariyanti², Anggun Larasati³, Nevrita⁴, Muhammad Yunus⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Maritim Raja Ali Haji

2203030001@student.umrah.ac.id

ABSTRAK

Dana BOS adalah dana yang diberikan kepada berbagai sekolah untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan operasional sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan dalam penggunaan dana BOS, serta prioritas utama dalam penggunaan dana BOS, kendala dalam pengelolaan dana BOS serta cara mengatasinya, dan proses pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana bos pada SMP Negeri 6 Tanjungpinang.. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini adalah: Pertama, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengobservasi ke sekolah yang akan di jadikan tempat untuk penelitian. Kedua, setelah dapat persetujuan dari pihak sekolah, peneliti membuat surat izin untuk melakukan wawancara. Ketiga, peneliti membuat instrumen yang nantinya akan diajukan saat wawancara. Keempat, peneliti mulai mewawancarai serta merekam informasi yang telah disampaikan oleh guru yang sudah di pilih untuk menjadi narasumber. Kelima, peneliti mencatat hasil laporan dari informasi wawancara tersebut dan kemudian informasi tersebut di buat menjadi artikel. Hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara, yaitu pengelolaan dan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 6 Tanjungpinang berlangsung dengan baik dan menjadikan pembelajaran dan pemeliharaan sebagai bagian dari prioritas dalam penggunaan dana BOS, yang mana hal ini akan dapat meningkatkan keefektivitasan proses pembelajaran dan juga mutu pembelajaran.

Kata Kunci: Keuangan, Akuntabilitas, Pendidikan.

ABSTRACT

BOS funds are funds given to various schools to support the financing of various school operational needs. The purpose of this study was to analyze the planning process in the use of BOS funds, as well as the main priorities in the use of BOS funds, obstacles in the management of BOS funds and how to overcome them, and the reporting process and accountability for the use of boss funds at SMP Negeri 6 Tanjungpinang. This research uses a qualitative descriptive method. The steps used in this method are: First, researchers collect data by observing the school that will be used as a place for research. Second, after obtaining approval from the school, the researcher made a permission letter to conduct an interview. Third, researchers made instruments that would later be submitted during the interview. Fourth, researchers

began interviewing and recording information that had been conveyed by the teacher who had been chosen to be the resource person. Fifth, researchers recorded the results of the report from the interview information and then the information was made into an article. The results of the research obtained from observations and interviews were that the management and use of BOS funds at SMP Negeri 6 Tanjungpinang were well managed and made learning and maintenance a priority in the use of BOS funds, which would improve the effectiveness of the learning process and also the quality of learning.

Keywords: Finance, Accountability, Education.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai hal dengan melewati kebijakan-kebijakan yang berada di bidang pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan selama kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas dengan melewati peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan pemberian akses yang lebih nyaman terhadap wssarga sekolah (Sumarni, 2014).

Pada suatu proses perkembangan dalam dunia pendidikan ini dengan mudah dikaitkan pada masalah pembiayaan yang menjadi sebuah masalah rumit untuk dipertimbangkan bagi para pengelolaan pendidikan. Yang dimana terdapat di masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, lalu proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran serta aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan ini akan menjadi masalah sentral dalam suatu pengelolaan kegiatan pendidikan.

Menurut Rahmawati et al. (2023), berdasarkan PP No 48 Tahun 2008, biaya pendidikan ini dibagi menjadi tiga kategori: biaya pendidikan, biaya organisasi dan administrasi pendidikan, dan biaya individu siswa. Aspek pengeluaran meliputi pengalokasian biaya pelatihan pada setiap komponen yang memerlukan pendanaan. Sebagian penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, pendidikan, dan infrastruktur. Aliran pendapatan ini terdiri dari berbagai jenis sumber yang perlu dikelola berdasarkan jenis data yang akan disinkronkan menggunakan item anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tanpa perencanaan, selain tidak mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, hal ini juga mengakibatkan penggunaan dana sekolah yang tidak bertanggung

jawab dan tidak tepat sasaran. Karena pengelolaan keuangan berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan sekolah, maka harus dipastikan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara profesional dan stabil.

Menurut Sumusal et al. (2024), Untuk melangsungkan pendidikan yang berkualitas, sumber pendanaan telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan pendanaan yang diterima sekolah dari pemerintah pusat adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diserahkan kepada setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan operasional sekolah. Dukungan tersebut diberikan untuk menunjang kebutuhan sekolah dalam hal kegiatan kehormatan, kemudian untuk penyediaan bahan dan alat pembelajaran, kemudian untuk menutupi biaya kebutuhan pemeliharaan sekolah. Dana BOS akan dicairkan oleh bendahara sekolah setelah mendapat persetujuan kepala sekolah dan selanjutnya sesuai kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan upaya menjaga saldo minimal.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai jenjang sekolah di Indonesia. Dana BOS, yang disediakan oleh pemerintah, bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan bagi kegiatan operasional sekolah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Dalam konteks ini, pengelolaan dana BOS yang optimal sangat penting untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam menunjang fasilitas pembelajaran dan berbagai kebutuhan pendidikan lainnya.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Tanjungpinang, sebagai salah satu institusi pendidikan negeri di kota Tanjungpinang, tidak terlepas dari tantangan dalam mengelola dana BOS secara efektif. Penggunaan dana yang tepat sasaran berpotensi meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar, dan memotivasi siswa serta tenaga pendidik untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik.

Namun, dalam praktiknya, optimalisasi pengelolaan dana BOS masih dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk masalah transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang matang. Keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang kurang mendalam mengenai alokasi dana seringkali menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana ini agar manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dalam penggunaan dana BOS, serta prioritas utama dalam penggunaan dana BOS, kendala dalam pengelolaan dana BOS serta cara mengatasinya, dan proses pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana bos pada SMP Negeri 6 Tanjungpinang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di SMP Negeri 6 Tanjungpinang yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim No. 2 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. Narasumber yang diwawancarai ialah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII yang juga menjabat sebagai bendahara SMP Negeri 6 Tanjungpinang, yaitu Bapak Yuda Adi Daya, S.Pd.

Adapun Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini adalah: Pertama, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengobservasi ke sekolah yang akan di jadikan tempat untuk penelitian. Kedua, setelah dapat persetujuan dari pihak sekolah, peneliti membuat surat izin untuk melakukan wawancara. Ketiga, peneliti membuat instrumen yang nantinya akan diajukan saat wawancara. Keempat, peneliti mulai mewawancarai serta merekam informasi yang telah disampaikan oleh guru yang sudah di pilih untuk menjadi narasumber. Kelima, peneliti mencatat hasil laporan dari informasi wawancara tersebut dan kemudian informasi tersebut di buat menjadi artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber dana keuangan merupakan komponen penting yang harus dikelola dengan baik. Sumber dana yang ada dimaksudkan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pemerintah menyediakan sumber dana pendidikan yang berkualitas dan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menangani dan mengelolah sumber dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Analisis sumber dana inilah yang menjadi tolak ukur kegiatan pengelolaan keuangan sekolah.

Dimana penelitian ini mengenai optimalisasi pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Tanjungpinang menghasilkan beberapa temuan penting terkait efektivitas penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran. Sehingga wawancara dilakukan penulis yang bertempat di SMP Negeri 6 Tanjungpinang

dengan salah satu guru yang telah dipilih, adapun penulis melampirkan dokumentasi saat melakukan wawancara tersebut di bawah ini.



Gambar 1. Wawancara Dengan Salah Satu Guru SMAN Tanjungpinang

Dimana penjelasan pada dokumentasi diatas yaitu, salah satu perwakilan penulis mulai mewawancarai salah satu guru yang bernama Bapak Yuda Adi Daya, S.Pd sebagai Guru Bahasa Indonesia di kelas VII dan juga merupakan Bendahara Sekolah SMP Negeri 6 Tanjungpinang.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Guru SMPN 6 Tanjungpinang

Dimana penjelasan pada dokumentasi diatas yaitu, foto sesi bersama saat penulis telah selesai mewawancarai salah satu guru. Adapun nama beserta jabatan dari guru yang telah diwawancarai penulis yaitu, ada Pak Yuda Adi Daya, S.Pd sebagai Guru Bahasa Indonesia di kelas VII dan juga merupakan Bendahara Sekolah SMP Negeri 6 Tanjungpinang.

Dari hasil wawancara yang Penulis lakukan terkait optimalisasi pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran di SMPN 6 Tanjungpinang, Penulis mendapatkan beberapa informasi terkait proses perencanaan dalam penggunaan dana BOS, prioritas utama dalam penggunaan dana BOS, kendala dalam pengelolaan dana BOS serta cara mengatasinya, dan proses pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 6 Tanjungpinang.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuda Adi Daya, S.Pd yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII dan juga merupakan Bendahara Sekolah pada SMP Negeri 6 memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Sebelum kita menganggarkan dana BOS, kita mengadakan rapat terlebih dahulu, yaitu rapat rencana penggunaan dana BOS. Rapat ini diikuti oleh majelis guru, kepala sekolah, bendahara dan staff tata usaha yang mana rapat ini yang dibicarakan adalah mengenai apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa untuk pembelajaran dan kegiatan seperti apa yang akan diikuti oleh siswa beserta guru, kalo guru ini mengikuti pelatihan kalo siswa mengikuti perlombaan atau kegiatan lainnya dan barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, seperti kalau kurang pada infokus maka kita beli atau meja guru yang retak ini disebutkan juga dalam rapat.”

Pernyataan diatas didukung oleh Muryati (2016), yang mengatakan bahwa penggunaan sumber BOS diprioritaskan pada kegiatan pokok sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan kesiswaan, meliputi: pengembangan standar proses, pengembangan standar penilaian, pengembangan standar pembiayaan, dan pengembangan standar sarana prasarana yang mengacu pada 8 standar proses dan 13 Item komponen penggunaan dana BOS yang menunjang peningkatan kemajuan dan mutu sekolah.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuda Adi Daya, S.Pd yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII dan juga merupakan Bendahara Sekolah pada SMP Negeri 6 memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Prioritas dalam penggunaan dana BOS ini ialah pertama untuk siswa kemudian guru, lalu pembelajaran juga termasuk dan pemeliharaan. Pemeliharaan disini maksudnya ialah seperti cat sekolah sudah pudar maka dicat, lalu pagar yang sudah retak dibetulin, lalu kalau pintu kamar mandi ada yang copot atau pecah maka kita beli baru. Siswa berarti kegiatannya mengikuti peningkatan prestasi ikut lomba ini yang paling utama, jadi tidak ada kata tidak atau tidak ada duit kalau untuk mengikuti lomba itu.”

Pernyataan diatas didukung oleh (Nugraha et al., 2023), yang mengatakan bahwa satuan pendidikan harus menyusun rencana penggunaan dana BOS dengan baik dan terencana. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan utama yang perlu diprioritaskan, seperti pembelian buku, alat-alat pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan fasilitas fisik yang diperlukan. Dalam menyusun rencana penggunaan dana, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuda Adi Daya, S.Pd yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII dan juga merupakan Bendahara Sekolah pada SMP Negeri 6 memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Kendala yang saya rasakan dalam dana bos ini ketika dana bos ini belum cair dari pusat, misalnya dana bos ini sekarang kan cair 2 kali dalam setahun dibulan januari dan di bulan juli bertahap tahap 1 tahap 2. Kendalanya ini yang aturannya januari harus cair ternyata belum cair. Jadi cara saya untuk menjalankan operasional ini tapi dana bos belum cair, jadi solusinya saya menggunakan dana pribadi terlebih dahulu atau mengutang untuk menutupi keterlambatan tersebut.”

Pernyataan diatas didukung oleh Satriadi et al. (2018), yang mengatakan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang selaku pelaksana tidak dapat memberikan kepastian waktu dalam proses pencairan dana tersebut, karena dari pusat pun tidak bisa memberikan kejelasan waktu. Mundurnya waktu penyaluran dana BOS dari waktu yang sudah ditetapkan mengakibatkan pihak sekolah dirugikan dan harus pande-pande menggunakan dana sekolah sampe dana cair, apalagi proses pencairan dana tersebut bisa mundur sampai triwulan kedua, seharusnya sekarang yang cair triwulan III tapi masih triwulan II. Tidak adanya kepastian waktu dalam penyaluran dana BOS bukan merupakan kesalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang semata, karena pihak Dinas hanya melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh pusat selaku aparat pemerintah.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuda Adi Daya, S.Pd yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII dan juga merupakan Bendahara Sekolah pada SMP Negeri 6 memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Proses pelaporan di SMPN 6 Tanjungpinang, jadi kami setiap bulannya melakukan pelaporan ke bagian dinas PSMP berupa surat pertanggung jawaban dan berupa BKU (Buku Kas Umum) jadi berapa kami belanja setiap bulannya berapa sisa saldonya kami laporkan dalam bentuk SPTJM dan BKU dan rekening koran. Hanya orang orang tertentu yang dapat memeriksa retorat, BPK dan dinas yang boleh periksa. Sistem pencairan dana BOS dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Tahap 1 pada bulan januari dan Tahap 2 pada bulan Juli. Sistem pembayaran dana bos sekarang ini tidak lagi dalam bentuk tunai, namun dalam bentuk non tunai menggunakan aplikasi CMS Brksyariah (menggunakan 2 rekening untuk dana bos dan juga gaji). Sistem ini non tunai jadi bisa di transfer namun ini tidak bisa melakukan penyeleweng dana karena ini pada saat transfer kepala sekolah ini harus tau jadi ada kode yg

diterima kepeksek melalui no hp nya kalau kode itu tidak dimasukkan ke sini maka tidak akan bisa transfer. Isinya ada terdapat rekening koran setiap bulan, lalu ada BKU setiap bulan, surat PTJ, SP3B, serta kwitansi beserta kegiatan.”

Pernyataan diatas didukung oleh Lestari et al. (2023), yang mengatakan bahwa ARKAS merupakan dokumen yang berisi rencana rencana pengembangan sekolah pada tahun berikutnya, yang dikembangkan sejalan dengan RKS dan dirancang untuk mengatasi kesenjangan antara kenyataan dan harapan untuk memenuhi Standar Nasional Pelaporan Dana BOS merupakan laporan penggunaan dana anggaran BOS oleh sekolah. Laporan tersebut memuat SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Berita Acara Rekonsiliasi, Daftar Kib B dan Kib E, BKU, Laporan Pemanfaatan dan kwitansi atas pengeluaran tersebut. Agar proses pencairan dana BOS berjalan lancar, sekolah harus mengirimkan laporan BOS secara online melalui situs resmi Kementetrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikburistek Pasal 6 No 8 Tahun 2020 tentang Catatan Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jika sekolah kedapatan tidak mengirimkan laporan BOS secara online, maka pemerintah tidak akan mengalokasikan dana BOS pada tahap berikutnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 6 Tanjungpinang mengenai optimalisasi pengelolaan dana BOS diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 6 Tanjungpinang berlangsung dengan baik walaupun terdapat kendala juga dalam keterlambatan pencairan dana BOS ini yang menyebabkan harus digunakannya terlebih dahulu dana pribadi untuk tetap dapat menjalankan operasional sekolah. Prioritas utama dalam penggunaan dana BOS ini ialah siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan lomba, kemudian guru, pembelajaran dan juga pemeliharaan sekolah. Dimana penggunaan dana BOS dalam pembelajaran dan pemeliharaan sekolah ini dapat meningkatkan keefektivitasan proses pembelajaran dan juga mutu pembelajaran.

Selain itu sebelum penggunaan dana BOS ini maka harus dilakukan rapat rencana penggunaan dana BOS terlebih dahulu. Lalu setiap bulannya SMP Negeri 6 Tanjungpinang akan melaporkan pengeluaran dan sisa saldo ke bagian dinas PSMP berupa surat pertanggung jawaban dan berupa BKU (Buku Kas Umum).

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, W., Mursalim, M., & Nurwana, A. (2023). Pengaruh Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bos Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dana BOS di Kota Makassar. *Journal on Education*, 5(4), 13139–13152.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 75–80. <https://doi.org/10.56832/pema.v3i2.355>
- Rahmawati, W., Madihah, H., & Jarkawi. (2023). Pelaksanaan Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah Pada MI Muhammadiyah 3 Al-Fuqran Banjarmasin Dan Istiqlal. *Terapung : Ilmu – Ilmu Sosial*, 5(2), 1–12.
- Satriadi, Agusven, T., & Kusumah, S. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Sektor Pendidikan (Studi Pelayanan Program Dana Bos Tingkat Sma Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Tanjungpinang*, 2(1), 28–39.
- Sumarni. (2014). Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 12(06), 83–98. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i1.75>
- Sumusal, S. D. M., Pontoh, S., Kaparang, M. W., & Kumajas, V. N. (2024). Kajian Pengelolaan Dan Operasional Sekolah. *Journal on Education*, 06(E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365), 19966–19975. website: <http://jonedu.org/index.php/joe>